

BAB I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Republik Rakyat Tiongkok (RRT) merupakan negara dengan sistem pemerintahan yang berideologi Komunis. Tiongkok berdiri sebagai Negara yang berdaulat pada tanggal satu oktober 1949 dimana momentum ini di tandai dengan deklarasi pengakhiran perang saudara yang terjadi antara Partai Komunis Tiongkok (PKT) dan Partai Nasionalis atau Kuomintang (KMT). Kondisi Demografi Tiongkok sendiri memiliki jumlah penduduk terbanyak didunia dengan angka populasi mencapai 1.398.720.000 jiwa dengan banding luas wilayah 9.596.960 Km². Masyarakat Cina sendiri memiliki beberapa suku bangsa diantaranya Tionghoa Han 91,6% , Zhuang 1,3% , Lain-lainnya 7,1%. Sedangkan dari klasifikasi pesebaran agama di Tiongkok memiliki cerita yang cukup unik dimana setelah terjadinya Revolusi Komunis, hampir 59% penduduknya menjadi Ateis, lalu sekitar 33% kepercayaan campuran antara Budha dan Taoisme, dan 18 juta penduduk Islam serta 14 juta penduduk Kristen. (The World Factbook, 2019)

Mayoritas etnis Uyghur merupakan pemeluk agama Islam. Mereka menempati wilayah di sebelah barat daya Tiongkok yaitu Xinjiang. Kelompok agama Islam di Uyghur telah terjalin sejak lama. Hal ini dapat di buktikan dari hubungan dagang Tiongkok dan Arab yang sejak lampau telah berlangsung. Xinjiang sendiri telah menjadi bagian dari kekuasaan Tiongkok sejak abad ke 18 dan wilayah ini telah lama mendapat status otonomi seutuhnya yang merupakan asal dari Xinjiang menjadi bagian dari Wilayah RRT . Dukungan kelompok separatis mulai ramai pada tahun 1990 setelah insiden Uni Soviet dan kemudian bermunculan negara negara muslim merdeka di Asia Tengah namun, upaya memerdekakan diri tetap ditindas dan dibubarkan oleh pemerintah Tiongkok. Faktor utama dari kekerasan yang kerap kali terdengar oleh masyarakat global pada akhir akhir ini pun disebut-sebut yaitu munculnya ketegangan etnis yang sebagian besar disebabkan oleh keadaan ekonomi dan budaya mereka. Palsalnya, proyek proyek besar telah membawa sangat banyak perubahan dan tingkat kemakmuran yang drastis pada kota kota di wilayah Xinjiang, yang mana hanya memilih orang orang Han untuk menempati kedudukan istimewa dan hal itu menjadi salah satu pemicu konflik etnis.

Kelompok etnis Uighur berada di daerah Xinjiang yang berada pada daerah yang cukup vital. Daerah ini berbatasan langsung dengan delapan negara di sekitarnya, diantaranya ; Rusia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Mongolia, India, Afghanistan, Pakistan, dan Tajikistan. Secara historis, masyarakat etnis Uighur dekat dengan kebudayaan Asia tengah. Hal ini merupakan salah satu alasan pemerintah Tiongkok mengambil beragam tindakan yang cukup kontroversial di mata internasional.

Menjadi minoritas secara agama maupun etnis menjadikan situasi sulit bagi masyarakat etnis Uyghur, mereka sering kali mendapatkan perlakuan buruk seperti : Terdapat beberapa laporan tentang vonis massal dan penangkapan sejumlah terduga separatisme yang sangat meresahkan. Banyak anak di bawah umur dimasukkan kedalam *camp* re-edukasi dimana mereka dipaksa untuk melupakan identitas Islam dan dipaksa untuk tunduk dibawah Partai Komunis Tiongkok. Bahkan media pemerintah Tiongkok telah melaporkan daftar panjang orang-orang yang dihukum karena aktivitas ekstremis dan dalam beberapa kasus, seperti putusan hukuman mati. Namun dari pihak PBB mendapat beberapa kesaksian dan bukti bahwa hingga satu juta warga Uighur dan kelompok Muslim lainnya ditahan di wilayah Xinjiang barat, dimana ditempat itu pula mereka menjalani apa yang disebut program pendidikan ulang. Ada juga laporan bahwa kelompok sosial etnis Uyghur perlahan dipaksa melupakan identitas ke-Islamannya seperti penghapusan tulisan Arab dan Halal di tempat penjualan makanan, dan juga menghancurkan tempat ibadah-ibadah umat muslim. Hal ini tentu secara langsung dibantah oleh Pemerintah Tiongkok tentang tudingan dari kelompok-kelompok HAM tersebut. Pada saat yang sama, ada semakin banyak bukti pengawasan represi terhadap orang-orang yang tinggal di Xinjiang. Pemerintah Tiongkok juga memberikan dasar tindakannya di banyak media hal itu selaras dengan upaya pemerintah di dalam menangani tiga isu yang berbahaya yaitu ; Terorisme, Separatisme, dan Extrimisme yang berada di daerah Xinjiang. (Hughes, 2018)

Gardner Bovington didalam buku *Autonomy in Xinjiang : Han Nationalist Imperatives and Uyghur Discontent*, mengatakan bahwa “*less severe policies would certainly have provoked less desperation and violence*” (Bovington, 2004). Maksud Bovington bahwa kebijakan Pemerintah Tiongkok di Xinjianglah yang menjadi sumber utama konflik. Akan ada sedikit konflik di wilayah tersebut jika praktik kebijakan Tiongkok tidak menggunakan tindakan yang represi. Kondisi di Xinjiang, etnis Uyghur tidak mendapatkan nasib yang sama dengan Han, dimana orang orang etnis Uyghur banyak yang bernasib miskin, dimana masyarakat Uyghur memiliki kemungkinan yang kecil untuk mendapat pendidikan yang baik,

dengan begitu probabilitas Uyghur untuk mendapatkan pekerjaan juga akan berpengaruh. Ketidakpuasan terhadap pemerintah dimana para demonstran Uyghur meninggalkan kenangan buruk dari pemerintahnya justru akan meningkatkan tindakan yang di dasari keputusan dan berujung kepada kekerasan. (Bovingdon, 2004)

Arienne M. Dwyer didalam bukunya *The Xinjiang Conflict: Uyghur Identity, Language Policy, and Political Discourse* mengatakan bahwa faktor bahasa yang mendukung konflik antara pemerintah Tiongkok dan Uyghur. Identitas budaya disini tepatnya Bahasa menjadi indikator masyarakat Uyghur terbatas untuk meningkatkan taraf hidup dan perbaur dengan masyarakat Han. Sedangkan dari Pemerintah Tiongkok juga tidak memberikan fasilitas dan dukungan secara komprehensif untuk menyelesaikan konflik budaya yang terjadi disana. Dibagian rekomendasi kebijakan, Dwyer menyarakan kepada Amerika Serikat yang memiliki hegemoni diruang internasional untuk melakukan (1) Memperomosiskan pemeliharaan dan Perluasan domain Bahasa untuk minoritas - Khususnya etnis Uyghur – didalam Pendidikan dan Media. (2) melonggarkan pembatasan pada ibadah agama dan instruksi untuk segala usia, baik di masjid dan di rumah. (3) Melatih dan memperkerjakan kader minoritas yang memiliki kekuatan nyata. (4) mengambil langkah seperti pelatihan dalam bidang teknologi untuk menekan angka pengangguran yang tinggi di kalangan etnis Uyghur. (5) memberi perhatian khusus pada pelatihan wanita. (Dwyer, 2005)

Joanne Smith Finley di dalam bukunya, *The Art of Symbolic Resistance : Uyghur Identities and Uyghur-Han Relations in Contemporary Xinjiang* menyatakan tiga point, diantaranya ; (1) kondisi sosial-ekonomi yang mengacu pada ketidaksetaraan, dapat melahirkan kebencian dan sifat agresif dari kaum yang tertindas. Oleh sebab itu pembangunan ekonomi untuk menciptakan stabilitas sosial perlu dikonstruksi secara komprehensif. (2) Pemerintah Tiongkok perlu memperhatikan kebijakannya didalam Bahasa dan Pendidikan. Dengan dalil Tiongkok yang menganggap etnis Uyghur adalah ‘Splittism’ dan subversi pemerintah dapat menggunakan instrument militernya untuk memusnakan budaya Uyghur dan menghilangkan Bahasa ibu mereka secara sistematis (Dwyer, 2005). (3) Undang-Undang yang ketat harus diperkenalkan dan ditegakkan untuk mencegah diskriminasi etnis di pasar tenaga kerja di wilayah tersebut. Diskriminasi etnis di wilayah ini juga menciptakan lapangan pekerjaan yang tercipta hanya untuk kelompok etnis Han saja. Oleh sebab itu dibutuhkan regulasi untuk melindungi dan menciptakan kesejahteraan bagi semua etnis yang berada di wilayah tersebut. (Finley, 2013)

Dengan melihat tindakan pemerintah Tiongkok yang menindas etnis Uyghur, hal ini mendapatkan respon dari dunia internasional dimana 22 negara menentang kebijakan yang dilakukan oleh Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Namun beberapa hari setelah itu pada tanggal 12 Juli 2019, 37 negara anggota PBB mendukung dan setuju atas tindakan pemerintah China. Surat itu dikirim kepada Michelle Bachelet sebagai Komisaris Tinggi HAM PBB. Tiga hari setelah itu, pemerintah Tiongkok mengundang Diplomat, Organisasi Internasional, dan wartawan melalui surat yang dipublikasikan ke Xinjiang didalam upaya penyaksian secara langsung kondisi dan kemajuan deradikalisasi dan kontraterorisme yang terjadi disana. (Raharjo, 2019)

Didalam daftar 37 nama-nama negara pendukung pemerintah Tiongkok terdapat beberapa negara Islam didalamnya yang juga tergabung didalam Organisasi Kerjasama Islam (OKI) diantaranya Aljazair, Bahrain, Kuwait, Sudan, Uni Emirat Arab, Somalia, Suriah, Mesir, Pakistan, Arab Saudi, Oman, Turkmenistan dan Tajikistan. (China: Muslim-Majority States Whitewash Abuses, 2019). Keterlibatan negara-negara OKI didalam pemberian dukungan terhadap pemerintah China, sekaligus membiaskan konstruksi tujuan awal organisasi itu dibangun.

“Kami memuji pencapaian Tiongkok yang luar biasa dalam hal HAM dengan pembangunan yang berpusat pada Individu yang bersamaan dengan pembangunan, perlindungan dan mempromosikan HAM melalui pembangunan. Kami juga menghargai upaya Cina untuk tujuan HAM internasional” (News, 2019). Tertulis didalam surat dukungan. Dapat dipahami bahwasannya 37 negara pendukung Cina dengan jelas mendukung aksi yang direalisasikan pemerintah Cina dalam menekan tiga kejahatan di Xinjiang.

Dukungan dari negara-negara Islam seperti Arab Saudi yang dinyatakan oleh Mohammed bin Salman, “Tiongkok memiliki hak untuk melakukan aksi menekan anti-terorisme dan ekstrimis demi kepentingan keamanan nasionalnya.” Kebijakan putra mahkota ini terlihat selaras dengan pendatangannya kesepakatan dagang Tiongkok-Arab yang membuat kesal sekutu baratnya. Pemerintah Tiongkok malah menuduh posisi barat malah mendukung kelompok teroris (Ensor, 2019). Negara-negara muslim terutama Arab Saudi yang seharusnya memposisikan diri dalam memberikan dukungan bagi etnis muslim di belahan dunia, malah

sekarang seolah kehilangan “taringnya” dalam melindungi umat muslim di Tiongkok seiring munculnya Arab Saudi sebagai mitra dagang penting bagi Tiongkok.

Ayjaz wani dalam tulisannya yang berjudul, "*China's Xinjiang Policy and the Silence of Islamic States*" menjelaskan bagaimana negara-negara Islam bersikap diam dan tidak mengkritik kebijakan pemerintah Tiongkok terhadap isu diskriminasi etnis Uyghur. Wani menjelaskan bagaimana pendekatan persuasif Tiongkok terhadap perjanjian jangka panjang disektor energi cukup menarik perhatian negara-negara Islam seperti Arab Saudi, Turki, Oman, Iran, Malaysia, dll. Dengan begitu, kesepakatan kerjasama ini membuat negara-negara Islam menahan diri dalam permasalahan Uyghur (Wani, 2021). Dari penelitian ini, tulisan saya bangkit memfokuskan negara Islam terbesar yaitu Arab Saudi, yang menjadi subjek penelitian saya. Dari penelitian sebelumnya juga tidak menggunakan paradigma Hubungan Internasional, yang mana akan saya kembangkan lebih lanjut menggunakan perspektif Realisme.

Neysa Rahmania dalam tulisannya yang berjudul "Analisis Gaya Kepemimpinan Muhammad Bin Salman (MBS) Melalui *Content Analysis* dan Pengaruh Pada Kebijakan Luar Negeri Budaya Arab Saudi Terhadap China" memberikan gambaran bagaimana perilaku MBS terhadap kerjasama dengan Tiongkok. Dalam tulisan ini, menganalisis perilaku MBS dan apa yang mendasari Saudi untuk mau bekerjasama dengan Tiongkok. Namun tulisan ini tidak menjelaskan sikap diam MBS terhadap etnis muslim di Xinjiang. Dari karya ini, penulis berangkat untuk menganalisa sikap diam MBS melalui teori Realisme. (Rahmania, 2019)

1.2. Rumusan Masalah

Persamaan Identitas biasanya menjadi tolak ukur sebuah negara dalam mengambil kebijakan luar negrinya. Namun terlihat jelas di studi kasus Uyghur, negara-negara yang memiliki persamaan Identitas dengan Muslim Uyghur justru tidak memberikan suara dukungan terhadap kaum yang tertindas ini. dari pernyataan ini dapat ditarik pertanyaan terkait rumusan masalahnya :

- 2.1. Mengapa Arab Saudi mendukung pemerintah Tiongkok dalam diskriminasi etnis Uyghur?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini di susun guna mengetahui dan memahami motif kebijakan luar negeri Arab Saudi yang telah merubah *Landscape* kebijakan terhadap sesama umat muslim di dunia

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Penelitian Secara Akademis

Secara Akademis, Penelitian ini dapat memberikan sumbangsih terhadap ilmu Hubungan Internasional terkait penggambaran fenomena yang terjadi di wilayah Asia Tengah

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian – penelitian berikutnya yang berfokus pada aktor negara Islam yaitu Arab Saudi dan konflik Uyghur di Cina

1.5. Kerangka Konseptual

Realisme adalah salah satu mazhab dalam Ilmu Hubungan Internasional yang berpendapat bahwa (1) Negara berdaulat merupakan aktor kunci dalam hubungan internasional, (2) Negara-negara di motivasi oleh sebuah dorongan untuk kekuasaan serta mengejar ‘kepentingan nasional’ (3) masalah utama hubungan internasional adalah anarki, yang berarti ketiadaan otoritas di atas negara yang mampu menindak dan berkuasa lebih dari kedaulatan negara. (4) keberadaan sifat agresif negara, di tambah dunia yang anarkis, membuat konflik menjadi realitas yang harus di hadapi. (5) sebuah persamaan mengenai tatanan dan keamanan bisa di pelihara dengan membentuk aliansi untuk mencegah terjadinya dominasi negara adikuasa, sehingga berpotensi menjadi ancaman bagi negara-negara lainnya. (6) institusi dan hukum internasional dapat beroperasi secara efektif jikalau di dukung oleh *Power* dan sanksi yang jelas. (Jill Steans and Lloyd Pettiford, 2009)

Pemikiran ini dapat dirunut dari karya Thomas Hobbes yang berjudul *Leviathan*, dalam buku tersebut Hobbes (a) manusia itu sama (bahasan gender yang lebih dominan berdasarkan standarisasi abad ke 17) , (b) interaksi diantara mereka bersifat anarkis , (c) mereka didorong oleh kompetisi, kemewahan, dan kemuliaan. Hobbes mengatakan bahwa ketika aktor yang setara melakukan interaksi dalam anarki, di dorong oleh persaingan, difusi, dan kemuliaan, konflik kekerasan yang terjadi secara umum mampu diprediksi (Hobbes, 1651)

Dalam perkembangan selanjutnya, seorang penulis imigran Jerman, Goachim Morgenthau menerapkan pemikiran Hobbes dalam konteks hubungan antar negara dalam bukunya berjudul "*Politics Among Nations*". Morgenthau memberikan 6 prinsip diantaranya ; Pertama adalah politik merupakan hal yang objektif yang berakar dari sifat alamiah manusia. Kedua dalam politik internasional realisme berpandangan bahwa negara mengejar kepentingannya yang didasarkan kepada kekuatan. Ketiga realisme memandang bahwa kepentingan yang didasarkan kekuatan tersebut selalu berubah-ubah, tidak tetap di satu titik saja. Keempat realisme memandang bahwa prinsip-prinsip moral universal tidak dapat dimasukkan kedalam perumusan kebijakan suatu negara. Kelima suatu negara tidak bisa menerapkan nilai yang mereka miliki untuk negara lainnya atau sebagai nilai universal. Keenam realisme politik berbeda dengan ilmu lainnya seperti ekonomi dan susila. (H. J. Morgenthau & K. W. Thompson, 1978)

Realisme bertumpu pada tiga paradigma dasar yaitu ;

1.5.1 Kedaulatan

Kedaulatan merupakan premis dasar realis. Awalnya kedaulatan berkembang pada periode abad ke 16 dimana secara massif populernya klaim atas kontrol berdasarkan territorial. Konsep ini lalu berkembang dengan terciptanya sistem pemerintahan yang mengkonstruksi aturan hukum dan sanksi. Konsep kedaulatan terus berkembang dan dewasa ini Politik pemerintahan yang demokratis dan non-demokratis serta adanya militer merupakan ciri dari kedaulatan. Menurut Hans J morgenthau , kedaulatan itu otoritas tertinggi dari kepemilikan wilayah tertentu dimana mereka yang di dalamnya memiliki kebebasan didalam mengatur urusan dalam negeri maupun luar negeri, dimana hal tersebut tidak mampu di batasi oleh Perjanjian Internasional ataupun Otoritas Internasional terkait. (H. J. Morgenthau & K. W. Thompson, 1978) Dalam hal ini, negara memiliki pilihan yang tidak terbatas didalam menentukan nasib

bagi bangsanya sendiri maupun bagi rakyatnya. Sebagai negara yang berdaulat, negara tetangga sudah seharusnya menghargai apa yang menjadi keputusan nasib bangsa itu sendiri.

1.5.2 Power

Kekuatan nasional menurut John T Rourke adalah jumlah seluruh atribut yang dimiliki oleh suatu negara yang dapat digunakan oleh negara tersebut untuk mencapai tujuannya bahkan jika tujuan tersebut bertentangan dengan tujuan dari negara lain (Rourke, 1986) Kekuatan merupakan ciri dari negara berdaulat. Dengan kekuatan yang mencakup kekuasaan negara akan mengontrol stabilitas secara domestik. Meskipun pada dasarnya negara akan berusaha menciptakan kondisi yang damai di dalam negrinya, namun kekuasaan juga dapat di gunakan untuk melawan kelompok sosial yang diduga mengganggu keamanan dan stabilitas domestik. Negara di sini sebagai aktor individu tidak ragu untuk menggunakan segenap aturan dan alat militer yang dimilikinya untuk melawan siapa saja yang mengancam perdamaian. Kelompok yang memiliki power baik mengambil tindakan subversif ataupun tidak, tidak semata-mata bertindak hanya demi menjaga posisi kedudukannya saja, bisa juga hal itu di dorong oleh faktor dari luar seperti media ataupun kelompok lainnya yang menuntut kelompok berkuasa ini untuk menjaga ketertiban bersama.

1.5.3 Kepentingan Nasional

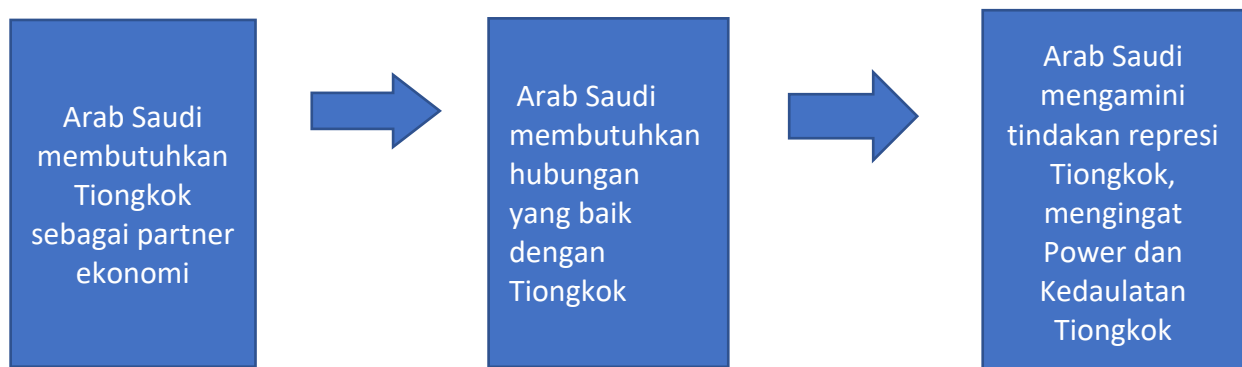
Kepentingan menurut kaum realis merupakan suatu hal yang dinamis. Realis menganggap kepentingan nasional merupakan indikator abadi, dimana arah dan pergerakannya harus di tentukan. Aliran realis sepakat didalam menjunjung moral-moral didalam tindakan politik. Selanjutnya, mengakui bahwa akan potensi ketegangan didalam keharusan dalam mengambil tindakan politik. Aliran ini melihat tindakan moral secara umum. Tindakan yang bersifat keadilan dan keamanan secara kolektif lebih di utamakan, meskipun hal tersebut membuat kondisi yang tidak aman atau tidak sesuai moral, hanya demi Kepentingan Nasional untuk kedepannya yang lebih baik lagi. (Sihombing, 1984)

Dari ketiga konsep diatas, penulis mengkolerasikan ketiga konsep tersebut. Hal ini mengingat dalam kasus dukungan Arab Saudi terhadap tindakan Pemerintah Tiongkok tidak dapat dilepaskan dari hubungan dengan Tiongkok. Dalam hal ini, Arab Saudi berada dalam posisi membutuhkan Tiongkok dari sektor ekonomi. Dalam bukunya, Morgenthau menjelaskan bahwa negara senantiasa berusaha mengejar kepentingan nasionalnya untuk mencapai *power*. Dalam usahanya mengejar kepentingan, Morgenthau juga menjelaskan

bahwa prinsip-prinsip moral universal tidak dapat dimasukkan kedalam perumusan kebijakan suatu negara, sehingga negara cenderung mengabaikan moralitas dalam usahanya mengejar kepentingan.

1.6. Hipotesis

Hipotesis dari tulisan ini adalah dukungan Arab Saudi terhadap pemerintah Tiongkok itu lebih didasari alasan pengejaran kepentingan nasional, dengan menggunakan alat *Power* dan Kedaulatan. Akibatnya sisi moral dan identitas dikesampingkan. Dalam hal ini pemerintah negara-negara Islam membutuhkan hubungan yang baik dengan pemerintah Tiongkok agar dapat mengejar kepentingan ekonominya sehingga mengabaikan statusnya sebagai Negara Islam untuk melindungi dan mendukung umat Islam yang didiskriminasi di Xinjiang.



1.7. Metodologi Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan jenis metodologi penelitian kualitatif. Untuk metode pengumpulan data, penulis akan menggunakan studi pustaka, seperti dari *website*, *report*, jurnal, dan buku-buku yang memiliki kaitan dengan topik penelitian ini. Sedangkan metode analisis data, penulis akan menggunakan metode analisis kongruen. Metode analisis kongruen adalah metode yang digunakan peneliti untuk membuktikan sebuah teori dapat menyelesaikan atau memprediksi hasil akhir dari suatu kasus (George & Andrew, 2005). Penulis akan mencari tahu variabel independen dari suatu kasus dan apa variabel dependen dari kasus itu berdasarkan teori yang digunakan. Kemudian penulis akan mencari data mengenai kasus tersebut dan jika teori yang digunakan tersebut terbukti, maka ada hubungan kausal dalam kasus tersebut